

Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan IPM terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2001-2018

Arif Rahman Hakim, Dewi Rahmi, Ade Yunita Mafruhah
 Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Islam Bandung,
 Bandung, Indonesia
 Email: Arahmanhakim66@gmail.com

Abstract—Poverty is a phenomenon that occurs in almost all developing countries. Poverty arises because of the inability of some people to carry out their lives to a degree that is considered humane. This condition causes a decrease in the quality of human resources so that the productivity and income it receives is low. This study aims to determine how much influence the minimum wage, inflation, economic growth and HDI on poor population in Indonesia. The method used is the Ordinary Least Square (OLS) method with a regression model. The data used in this study are secondary data published by BPS 2001-2018. The data is processed using the E-views program 7. The results of the study show that minimum wages and HDI have a negative and significant effect on poor population in Indonesia, while inflation has a positive and significant effect on poor population in Indonesia and economic growth does not significantly influence on poor population in Indonesia.

Keywords—Minimum Wage, Inflation, HDI, Economic Growth, Poor Population.

Abstrak—Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan seberapa besar pengaruh upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan model regresi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS periode 2001-2018. Data diolah dengan menggunakan program E-views 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Kata Kunci—Upah Minimum, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Jumlah Penduduk Miskin.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin

kecilnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, juga harus menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan tingkat pengangguran (Todaro, 2008:18).

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktifitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah.

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih di bawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Seseorang dikatakan miskin bila orang yang bersangkutan belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan.

Menurut Dwijayanto (2010), semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi yang terdiri dari dua elemen yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

TABEL 1. PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM, INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA TAHUN 2014-2018

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Inflasi (%)	IPM	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)
2014	1,506,231	8,36	68,90	5,60	28,00
2015	1,790,342	3,35	69,55	4,88	28,55
2016	1,997,819	3,02	70,18	5,03	27,88
2017	2,057,528	3,61	70,81	4,21	27,17
2018	2,125,452	3,13	71,39	5,17	25,95

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019
 el 1 dapat memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2018 sebanyak 25,95 juta orang, sedikit lebih rendah

dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2014 yang berjumlah 28,00 juta orang. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun namun secara kualitas kondisi kemiskinan semakin parah. Hal ini dapat diidentifikasi dari tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia sebagaimana terlihat dari data BPS. Tingkat kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia pada bulan September 2016 sebesar 1,74 dan meningkat menjadi 1,83 pada bulan yang sama tahun 2017 (BPS, 2017). Ini artinya secara kuantitas jumlah penduduk miskin menurun namun kondisi seseorang miskin semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Kondisi ini diperparah oleh (inflasi) peningkatan harga-harga kebutuhan di masyarakat. Pada tahun 2017 upah minimum sebesar Rp 2,057,528 perbulan dan tahun 2018 upah minimum meningkat menjadi Rp 2,125,452. Namun dalam waktu bersamaan ternyata inflasi juga mengalami fluktuasi, artinya peningkatan upah nominal terkikis oleh peningkatan harga-harga kebutuhan di masyarakat. Hal ini berakibat pada penurunan pendapatan riil masyarakat. Dengan demikian, kenaikan upah tidak menjadikan masyarakat lebih sejahtera tetapi dimungkinkan akan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selain itu dari tahun 2014 hingga tahun 2018 pertumbuhan ekonomi juga mengalami fluktuasi. Hal ini secara langsung juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Dari data tersebut juga terlihat pada tahun 2014 hingga 2015 terdapat hubungan searah antara IPM dengan Jumlah Penduduk Miskin. Artinya penurunan jumlah penduduk miskin pada saat IPM turun mengindikasikan terdapat faktor lain yang menyebabkan menurunnya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2001-2018.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis besarnya pengaruh upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2001-2018.

II. LANDASAN TEORI

Kemiskinan menurut *World Bank* merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya. standar rasio tingkat kemiskinan yang ditetapkan oleh *World Bank* sebesar \$2/day atau sekitar Rp 22,000.00/hari.

Sementara itu, indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan (*poverty line*). BPS (Badan Pusat Statistik) menentukan batas garis

kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.

Mengenai upah, Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2000 (UU Tenaga Kerja), Bab I, Pasal I, Ayat 30 menjelaskan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. UU Tenaga Kerja juga memberi definisi bagi upah minimum, dalam UU tersebut upah minimum dimaknai sebagai suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja, ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja.

Pengertian inflasi secara umum dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga umum secara terus menerus dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Nopirin 1992 dalam Vio Achfuda, 2010) :

a. Demand Pull Inflation

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat terhadap akan berbagai barang terlalu kuat. *Demand pull inflation* terjadi karena kenaikan permintaan agregat dimana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh.

Kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan tidak lagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya mendorong kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan permintaan yang melebihi produk domestik bruto akan menyebabkan *inflationary gap* yang menyebabkan inflasi.

b. Cost Push Inflation

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada *Cost Push Inflation* tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus menurun karena adanya kenaikan biaya produksi.

c. Mixed Inflation

Gejala kombinasi antara unsur inflasi yang disebabkan karena kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Pada umumnya bentuk yang sering terjadi adalah inflasi campuran, yaitu kombinasi dari kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi, dan sering sekali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet (Jinghan: 2000), adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang - barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan

TABEL 2. RINGKASAN PENGUJIAN ASUMSI KLASIK

No	Jenis Pengujian	Alat Uji	Hasil
1	Heteroskedastis	Uji White: $Obs \cdot R\text{-Squared} = 14.97320, \alpha = 0.1$ ($14.97320 > 0.1$)	Tidak terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastis
2	Autokorelasi	Uji LM: $Obs \cdot R\text{-Squared} = 1.628489, \alpha = 0.1$ ($1.628489 > 0.1$)	Tidak masalah autokorelasi
3	Multikolinier	$R^2 = 0.933644$ $R^2_{W_Inflasi \cdot PE \cdot IPM} = 0.530644$ $R^2_{Inflasi \cdot W \cdot PE \cdot IPM} = 0.346681$ $R^2_{PE \cdot W \cdot Inflasi \cdot IPM} = 0.450066$ $R^2_{IPM \cdot W \cdot Inflasi \cdot PE} = 0.549557$	Tidak terdapat masalah multikolinier antara variabel bebas dalam model estimasi
4	Linieritas	Uji Ramsey: $F\text{-statistik} = 0.237354, \alpha = 0.1$ ($0.237354 > 0.1$)	Model estimasi bersifat linear
5	Normalitas	J-B Test: Probabilitas $0.619326, \alpha = 0.1$ ($0.619326 > 0.1$)	Model estimasi berdistribusi normal

teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukannya.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas).

Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

1. Heteroskedastis

Dari Tabel 2. hasil uji heteroskedastis dengan menggunakan uji white memiliki kriteria bahwa nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$ lebih besar dari $\alpha = 0.1$ ($14.97320 > 0.1$). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti pada model regresi tidak terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastis.

Autokorelasi

Dari Tabel 2. hasil perhitungan uji LM diperoleh nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$ sebesar 1.628489 lebih besar dari $\alpha = 0.1$ berarti H_0 diterima. Artinya dalam model estimasi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Multikolinier

Dari Tabel 2. hasil pengujian diperoleh R^2 baru yang lebih kecil dari R^2 lama. Artinya tidak terdapat masalah multikolinier antara variabel bebas dalam model estimasi.

Linearitas

Dari Tabel 2. hasil pengujian diperoleh F-statistik yang lebih besar dari tingkat $\alpha = 0.1$ ($0.237354 > 0.1$) artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 90% model estimasi bersifat linear.

2. Uji Normalitas

Dari Tabel 2. hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat $\alpha = 0.1$ ($0.619326 > 0.1$) artinya H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 90% residual dari model estimasi berdistribusi normal.

B. Uji Statistika

1. Uji-T

TABEL 3. RINGKASAN NILAI T-STATISTIK MODEL PENGARUH UPAH MINIMUM, INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Variabel	t-statistik	t-tabel	Hasil Uji	Hasil
LNW	-6.536801	1.782	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha = 0.1$
INF(-1)	2.550808	1.782	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha = 0.1$
PE	1.317032	1.782	t-statistik < t-tabel	Tidak Signifikan pada $\alpha = 0.1$
LNIPM (-1)	-1.791838	1.782	t-statistik > t-tabel	Signifikan pada $\alpha = 0.1$

Sumber : Hasil data diolah, Eviews-7

Dari Tabel 3. hasil estimasi untuk variabel upah

minimum, inflasi dan IPM diperoleh t-statistik > t-tabel maka Ho ditolak yang berarti variabel upah minimum, inflasi dan IPM secara parsial berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tingkat signifikan 90%. Sedangkan untuk variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh t-statistik < t-tabel maka Ho diterima yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada tingkat signifikan 90%.

2. Uji-F

TABEL 4. RINGKASAN NILAI F-STATISTIK MODEL PENGARUH UPAH MINIMUM, INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IPM TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN.

Variabel	F-hitung	F-tabel	Hasil Uji
Upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi, IPM	42.21096	2.43	F-hitung > F-tabel

Sumber : Hasil data diolah, Eviews-7

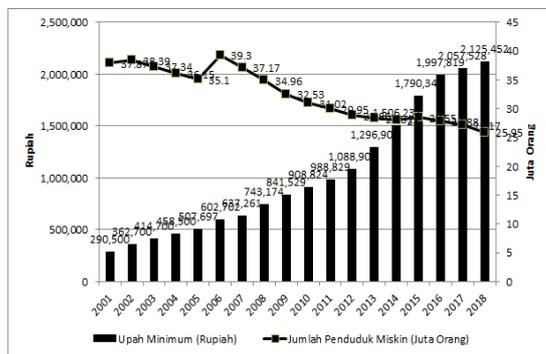
Dari Tabel 4. dengan menggunakan derajat kebebasan pembilang (k-1=4) dan derajat kebebasan penyebut (n-k = 13), diperoleh hasil (f-tabel = 2.43) pada tingkat signifikan 0.1, untuk f-hitungnya yaitu 42.21096 dengan membandingkan antara f-hitung dengan f-tabel diperoleh f-hitung > f-tabel sehingga Ho ditolak. Artinya variabel upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan IPM secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tingkat kepercayaan 90%.

3. Koefisien Determinasi

Dari hasil estimasi didapat nilai (R²) yaitu 0.933644 atau 93,36%, artinya 93,36%, variasi dari variabel terikat atau tingkat kemiskinan dapat dijelaskan atau diterangkan oleh variabel bebasnya yaitu upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan IPM sementara sisanya diterangkan oleh variabel lain diluar model.

C. Analisis Ekonomi

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Jumlah Penduduk Miskin



Sumber : Data diolah

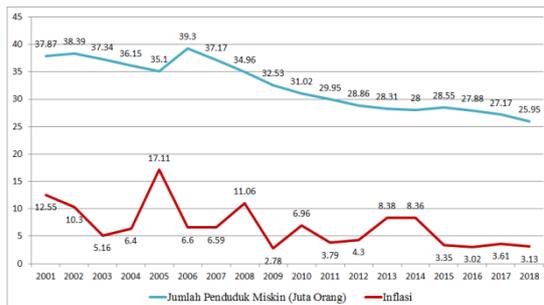
Gambar 1 Perkembangan Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2001 – 2018.

Dari Gambar 1, terlihat pada tahun 2005 hingga tahun 2006 upah minimum mengalami peningkatan dari Rp. 507,697 pada tahun 2005 menjadi Rp 602,702 pada tahun 2006. Pada periode yang sama peningkatan jumlah upah minimum tidak diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 35,10 juta orang menjadi 39,30 juta orang. Meningkatnya upah minimum Rp 100.000 ternyata tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga di dalam perekonomian karena adanya kenaikan harga BBM.

Pada bulan Februari 2005 telah terjadi kenaikan inflasi sebesar 17,95%. Artinya kenaikan upah sebesar 18,71% terkikis habis oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sebesar 17,95%. Kenaikan BBM telah memicu naiknya berbagai macam komoditas yang disebabkan BBM akan membebani biaya produksi baik dari ongkos transportasi maupun kenaikan biaya bahan bakar.

Dengan demikian, kenaikan BBM menjadi pemicu meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia, karena semakin banyak masyarakat miskin yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara layak.

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin



Gambar 2 Perkembangan Inflasi dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2001 – 2018.

Pada Gambar 2, tahun 2005-2006 pemerintah mengeluarkan kebijakan pencabutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berdampak pada peningkatan sejumlah BBM. Yaitu kenaikan harga premium dari harga Rp 4,500/liter menjadi Rp 6,500/liter. Peningkatan harga BBM ini telah berdampak pada peningkatan hampir seluruh komoditas kebutuhan pokok masyarakat (inflasi naik sebesar 17,11%). Kondisi ini, secara langsung meningkatkan jumlah penduduk miskin dari 35,1 Juta Orang menjadi 39,3 Juta Orang. Meskipun peningkatan harga BBM ini diikuti oleh kenaikan upah minimum ternyata kenaikan upah masyarakat tidak mampu menutupi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

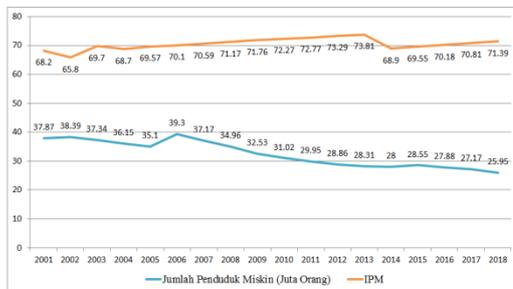
Dari dampak kenaikan harga, upaya pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 memperkenalkan program BLT kepada masyarakat. Pada tahun yang sama oktober 2005 hingga desember 2006 digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bersyarat. Pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara

Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Dari hasil model estimasi diperoleh nilai t-statistik sebesar 1.317032 sementara untuk t-tabelnya yaitu sebesar 1.782 dengan membandingkan antara t-statistik dengan t-tabel maka H_0 diterima. Artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi secara makro. Pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada pengurangan jumlah penduduk miskin yang ada. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berdampak pada keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut. Belum lagi jika terjadi penggunaan tenaga kerja asing di perusahaan tersebut.

4. Pengaruh IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin



Sumber: Data diolah

Gambar 3 Perkembangan IPM dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2001 – 2018.

Pada Gambar 3, terlihat perkembangan IPM yang terus meningkat pada beberapa tahun tertentu, seperti tahun 2002 hingga 2003. IPM mengalami peningkatan dari 65,8 pada tahun 2002 menjadi 69,7 pada tahun 2003. Peningkatan IPM tahun 2002-2003 ini sebagai efek dari meningkatnya angka harapan hidup dari 76,20 menjadi 78,80 dan angka melek huruf dari 89,50 dan 90,93. Sementara daya beli masyarakat mengalami penurunan dari 58,47 menjadi 56,89. Daya beli masyarakat Indonesia cenderung mengalami penurunan terhadap beberapa kategori produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil estimasi teridentifikasi hanya terdapat tiga variabel independen yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Variabel tersebut diantaranya upah minimum, inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga variabel tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, hubungan antar variabel dependen dan independen sesuai dengan

hipotesis awal. Berdasarkan koefisien regresi variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah IPM disusul dengan upah minimum dan inflasi. Adapun variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Jika diuji secara bersama-sama semua variabel secara bersamaan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Besarnya pengaruh variabel upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 93,36%, sementara sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini. Jadi pengaruh keempat variabel independen ketika diuji secara bersamaan sangat kuat terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achfuda. (2010). Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, PDB, Inflasi, dan Tingkat Teknologi Terhadap PMDN di Indonesia Periode 1986-2008. Semarang: UNDIP.
- [2] Bank Dunia. (2001). World Development Report 2000/2001. Washington D.C.: Bank Dunia.
- [3] BPS. (2001). Indonesia dalam Angka 2000. Jakarta: BPS.
- [4] BPS. (2017). Indonesia dalam Angka 2017. Jakarta: BPS.
- [5] Dwijayanto. (2010). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008. Semarang: UNDIP.
- [6] Jinghan. (2000). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Nopirin. (1992). Ekonomi Moneter II. Yogyakarta: BPFE.
- [8] Todaro, M. P. (2008). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- [9] Undang-Undang No.15 Tahun 2008 tentang Tenaga Kerja